

SINERGI MEWUJUDKAN VISI PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Biyanto

Dosen Aqidah Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
email: mr_abien@yahoo.com

Abstract:

This article discusses about the education of Muhammadiyah. The specialization of this study is synergy to realize point of view of Muhammadiyah on education. Based on research of literature, discovered six points of view of Muhammadiyah on education. First, the education of Muhammadiyah must become media in order to teach the concept of progressive Islam (Islam Berkemajuan). Second, the education of Muhammadiyah must become path of the enlightenment movement for the ummah. Third, the education of Muhammadiyah must give guarantee to realize the Theology of al-Ma'un (al-Ma'unism). Fourth, the education of Muhammadiyah must be pioneer for education of multiculturalism. Fifth, the education of Muhammadiyah must combine sincerity and professionalism values. Sixth, the education of Muhammadiyah must become media of religious proselytizing and forming of cadres, special for the student. In order to achieve the perspective, the institution of education of Muhammadiyah must involve stakeholders, specifically institute of higher education of Muhammadiyah (perguruan tinggi Muhammadiyah, PTM). PTM can become Muhammadiyah's schools as school of founding.

Keywords: sinergi, education, Muhammadiyah

Pendahuluan

Secara kuantitas jumlah pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah sangat banyak. Karena itu tidak berlebihan jika ada orang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah seharusnya turut bertanggung jawab pada nasib pendidikan nasional. Saat rangking pendidikan nasional tercecer di posisi bawah diantara negara-negara lain, kiprah Muhammadiyah juga dipertanyakan. Disamping persoalan mutu, pendidikan nasional juga dikritik karena belum mampu melahirkan individu yang berkarakter dan berintegritas. Yang ironis, justru terjadi banyak ketakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang melibatkan unsur-unsur di sekolah saat ujian nasional (Unas). Kasus sontekan massal saat Unas terasa begitu sistemik dan massif.

Pemerintah secara tidak langsung sesungguhnya juga mengakui praktek ketakjujuran saat Unas. Hal itu dapat dilihat dari paket soal yang diujikan. Misalnya dalam Unas 2013, paket soal yang diujikan mencapai 20 buah. Padahal dalam Unas 2012, paket soal yang diujikan hanya 5 buah. Pemerintah pun tetap menjadikan Unas sebagai salah satu alat menentukan kelulusan siswa. Padahal sejauh ini kebijakan Unas terus disorot karena dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang mereduksi pendidikan hanya sekedar pabrik ijazah (*diploma*